



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : DEPARTEMEN KEUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIKA SATRIANA DEWI
2. Jabatan : KEPALA DEPARTEMEN
3. NHK : 279761

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 11.903.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 171 m2/248 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 32 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 46 m2/51 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 803.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.060.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS SEDAN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
3. MOBIL, MAZDA CX 30 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 610.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 986.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 900.000.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 977.971.228**

F. HARTA LAINNYA **Rp. 208.043.085**

Sub Total **Rp. 16.035.514.313**

III. HUTANG **Rp. 2.570.162.608**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 13.465.351.705**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.